

Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China

Aprilia Dwi Rasdiyanti¹, Suyeno²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik,
Universitas Islam Malang, Indonesia

*Corresponding author: suyeno@unisma.ac.id

Abstract

This research describes the results of the SWOT analysis of the implementation of the Local Currency Settlement (LCS) policy carried out by the countries of Indonesia and China in trade and investment activities. The research uses a literature review as a method and using SWOT analysis as an analytical technique with secondary data as a data source. Secondary data were collected from literature reviews of journals, websites, books, and news articles. The results of this discussion include the advantages of implementing LCS such as transaction efficiency, and currency standardization using SNAP, weaknesses in implementing LCS such as currency rate cannot always be the same and will change according to world financial markets, challenges in implementing LCS include data security threats such as Card Skimming, Carding, and Phishing and financial crises such as inflation, as well as opportunities for implementing LCS such as increasing Indonesia's export power to China with easy access to LCS services for large businesses and Indonesian UMKM.

Keywords: Local Currency Settlement, Analysis, Indonesia, China

I. Pendahuluan

Berbagai negara mulai mengurangi efek dominasi mata uang Dolar Amerika Serikat dalam hal pembayaran atau transaksi perdagangan. Rusia mende-dolarisasi neraca dagangnya, aset bank hingga perusahaan energi raksasa mereka juga turut menggunakan Rubel (mata uang Rusia) sebagai mata uang dalam kegiatan transaksi. Tidak hanya Rusia, China yang muncul sebagai kekuatan ekonomi raksasa di Asia mulai meninggalkan Dolar dan menggunakan Yuan sebagai alat transaksi dengan beberapa negara. Bank sentral di China dan Uni Eropa juga membuat perjanjian perdagangan dengan negara-negara lainnya untuk menggunakan mata uang mereka masing-masing dan mengabaikan sanksi dari Amerika Serikat. Uni Eropa juga membuat instrumen Instex dengan negara-negara mitra mereka agar dapat melakukan transaksi tanpa harus takut mendapat sanksi dari Amerika Serikat (Rinaldi, 2020).

Pada April 2019, keempat negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina menandatangani kesepakatan penggunaan uang lokal sebagai mata uang transaksi perdagangan bilateral, sehingga penggunaan Rupiah semakin luas di kalangan negara ASEAN. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia dalam menguatkan nilai tukar Rupiah. Nilai tukar Rupiah juga mendapatkan sentimen positif setelah mulai menurunnya tensi perang dagang AS - China yang ditandai dengan pembelian barang AS pada tanggal 15 Januari 2020 senilai USD 200 miliar, dengan turunnya tensi perang dagang AS-China, Indonesia memiliki peluang yang baik untuk mengurangi penggunaan Dolar Amerika Serikat, terlebih saat volume perdagangan Internasional Indonesia pada November 2019 mencapai USD 309.272 juta (Rinaldi, 2020).

Dolar Amerika Serikat pada mulanya menjadi mata uang transaksi di berbagai negara karena di pandang stabil, hal ini dikarenakan Amerika Serikat mempunyai nilai bisnis yang tinggi dengan negara- negara di dunia. Transaksi yang menggunakan Dolar AS kemudian menjadi lebih luas tidak hanya bagi kegiatan perdagangan dengan Amerika Serikat saja, namun juga negara-negara yang tidak memiliki hubungan perdagangan dengan Amerika turut menggunakan Dolar AS saat transaksi (Frassminggi, 2014).

Kebiasaan ini menjadikan negara-negara di dunia memiliki ketergantungan pada Dolar AS, akibatnya negara-negara di dunia harus tunduk patuh terhadap yurisdiksi AS untuk menghindari sanksi ekonomi yang dibuat oleh AS. Seperti kesewenang- wenangan AS saat memutus sepihak perjanjian nuklir Iran 2015 pada tahun 2018 dan mengancam perusahaan asing yang melakukan hubungan bisnis dengan Iran. Setelah kebijakan tersebut diberikan, perusahaan energi milik Perancis bernama Total akhirnya harus bersiap untuk meninggalkan proyek ladang gas alamnya yang sudah dimulai pasca perjanjian nuklir dengan Iran tahun 2015. Sanksi yang diberikan oleh AS saat mengancam tersebut membahayakan perusahaan multinasional seperti Total dan perusahaan Uni Eropa lainnya yang ingin berbisnis dengan Iran. Oleh sebab itu, negara-negara Uni Eropa berani mengambil langkah tidak menggunakan Dolar AS dan mengurangi dominasi Dolar AS di Uni Eropa (Sebayang, 2019).

Saat negara-negara di Eropa maupun China dan Korea Selatan mengurangi ketergantungan transaksi internasional menggunakan mata uang Dolar AS, Indonesia juga memanfaatkan peluang tersebut dan mulai mengadakan kesepakatan perdagangan internasional dengan menggunakan sistem pembayaran *Local Currency Settlement* (Transaksi menggunakan mata uang lokal). Selain dengan negara ASEAN, Indonesia melakukan kesepakatan dengan Jepang dan China untuk menjadikan LCS sebagai sistem pembayaran terlebih pada transaksi perdagangan. Pada 22 September 2020 lalu Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan China mengenai LCS dan pada bulan Agustus 2021 Indonesia lewat Bank Indonesia dan China diwakili People's Bank of China sepakat untuk menerapkan LCS atau penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan kedua negara. Hal ini disambut antusias oleh pelaku usaha dari kedua negara, perbankan serta Apindo sebagai organisasi para pengusaha (Kemendag RI, 2021).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral menggunakan Mata Uang Lokal yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 23/16/PADG/2021 untuk mendukung penerapan LCS Bank Indonesia dan People's Bank of China menunjuk bank-bank di kedua negara yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan transaksi pembayaran dengan mata uang lokal. Bank-bank yang telah ditunjuk oleh kedua negara ini disebut sebagai bank fasilitator atau *Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)*. Beberapa syarat untuk menjadi bank ACCD antara lain telah berpengalaman dalam memberikan fasilitas transaksi perdagangan dan investasi di kedua negara. Bank-bank tersebut harus memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan berbagai jasa keuangan serta memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan bank di negara mitra (BI, 2021).

China menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat investasi tinggi di Indonesia, terlebih setelah kebijakan BRI (*Belt and Road Initiative*) milik China, nilai investasi China ke Indonesia semakin bertambah. Berbagai proyek pembangunan seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di beberapa wilayah Indonesia dan kerjasama di bidang perdagangan dan maritime lainnya tidak terlepas dari investasi yang diberikan oleh China. Selama masa Presiden Jokowi pada tahun 2014 saja, nilai investasi China ke Indonesia hampir mendekati angka USD 800 juta atau senilai IDR 10,8 triliun dengan jumlah

menyamai 501 unit proyek, dan jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2016 senilai USD 2,6 miliar atau sebesar IDR 35,2 triliun dengan 1.734 proyek yang dikerjakan (Perkasa, 2019).

China termasuk mitra dagang terbesar yang dimiliki Indonesia dengan adanya peningkatan volume perdagangan antara China dan Indonesia maka kedua negara memiliki potensi kerja sama yang semakin kuat di masa depan. Pada tahun 2020, nilai perdagangan Indonesia dan China mencapai USD 71,4 miliar, sedangkan pada ranah ekspor pada semester pertama tahun 2021, Indonesia mampu mencapai USD 22,45 miliar atau sekitar 21,82 persen dari total ekspor Indonesia. Kabar baik ini berbanding lurus dengan implikasi positif adanya kebijakan LCS antar kedua negara. Kedepannya implementasi LCS diharapkan oleh berbagai pihak terutama pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha untuk meningkatkan kerja sama ekonomi serta mengurangi tingkat resiko nilai valuta asing, pelaku eksportir dan importir juga akan mendapatkan perlindungan efisiensi harga, investasi dan perdagangan serta efektivitas transaksi pertukaran mata uang kedua negara dengan harga rendah (Kemendag RI). Namun kebijakan LCS tentu tidak dapat menghilangkan dominasi dolar sepenuhnya, dan resiko baru dalam penerapan tidak dapat dihindarkan, misal saja resiko yang diakibatkan inflasi, gejolak politik kedua negara, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter di kedua negara. Untuk itu maka peneliti ingin mengkaji kelebihan, kekurangan, peluang, dan hambatan dari kebijakan LCS Indonesia – China ini bagi Indonesia .

II. Landasan Teori

Teori Politik Ekonomi

Seringkali terdapat bias pengertian antara ekonomi politik dan politik ekonomi. Menurut Watson yang merupakan pakar ekonom global lebih mengartikan politik ekonomi sebagai turunan dari disiplin ilmu hubungan internasional sedangkan Broome memilih tidak mendikotomi antara politik ekonomi dan hubungan internasional, dilain pihak, Stillwell berpendapat politik ekonomi adalah disiplin ilmu yang berfokus untuk menganalisis peristiwa ekonomi dari sudut pandang ilmu sosial, yang mana kedudukan ilmu politik ekonomi lebih kompleks dan luas daripada ilmu politik (Malik, 2020). Kemudian ekonomi politik menurut Frieden & Lake diartikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi, berbeda dengan pendapat Frieden , Strange berargumen bahwa ekonomi politik merupakan studi yang berfokus pada distribusi nilai-nilai seperti kekayaan, kebutuhan materiil, keamanan, kebebasan, keadilan, dan kebebasan (Mas'oed, 2008).

Pandangan dan paradigma mengenai politik dan ekonomi berkembang seiring dengan dinamika politik dan ekonomi global, namun Malik berhasil menemukan perbedaan mendasar di antara dua perspektif tersebut, karena kedua konsep antara politik ekonomi dan ekonomi politik tidak dapat disamakan agar tidak terjadi salah kaprah dalam melakukan analisis dan aplikasi dalam memahami kedua konsep tersebut. Malik mendasarkan perbedaan ekonomi politik dan politik ekonomi dari ontologi dan epistemologinya. Jika ekonomi politik berpandangan mengenai permasalahan politik dari sudut pandang ekonomi , maka politik ekonomi memandang ilmu ekonomi dari sudut pandang politik. Hal ini dilihat dari sejarah hadirnya pendekatan dan metodologi ilmiah yang ada pada mazhab neoklasik yang dilestarikan oleh *American School* dan diteruskan ke berbagai belahan dunia yang menerapkan kurikulum dan sumber rujukan yang sama , dimana studi ekonomi politik lebih mendominasi dan penyebarannya melahirkan mekanisme penyelesaian masalah dengan

pendekatan ekonomi politik. pendekatan ini cenderung memandang pasar sebagai instrumen yang dapat lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Berbeda dengan pendekatan yang berkembang dari pakar dan akademisi di *British School* serta *Australian School* yang lebih cenderung menitikberatkan pada politik ekonomi. Pendekatan ini melihat bahwa peran aktor politik sangat penting dalam aktivitas ekonomi secara global maupun nasional. Selain itu, kekuasaan mendapat perhatian lebih karena dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi (Malik, 2020).

Dalam perspektif politik ekonomi, kebijakan publik dipandang sebagai produk dari kekuasaan politik pemerintah dimana lebih lanjut menurut penjelasan Easton kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah memiliki kekuasaan otoritas dalam sistem politik. Otoritas ini memberikan dampak kepada masyarakat luas (Agustino, 2017). Penelitian ini membahas salah satu kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam bidang perdagangan internasional. Kebijakan tersebut disebut *Local Currency Settlement* atau pembayaran transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal. Kebijakan LCS hadir untuk mengatur cara baru melakukan pembayaran transaksi perdagangan antar negara Indonesia dan China menggunakan mata uang lokal sebagai alat tukar atau alat transaksi.

Framework Kebijakan *Local Currency Settlement* Indonesia dan China

Framework *Local Currency Settlement* (LCS) adalah program Bank Indonesia untuk menginternasionalisasikan Rupiah dengan cara menjalin kerjasama dengan negara mitra ekonominya dalam penggunaan sistem pembayaran mata uang lokal pada setiap transaksi perdagangan maupun investasi. Untuk mendukung penerapan LCS Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBoC) menunjuk bank-bank di kedua negara yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan transaksi pembayaran dengan mata uang local (Bank Indonesia, 2020). Bank-bank yang telah ditunjuk oleh kedua negara ini disebut sebagai bank fasilitator atau *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD). Berikut adalah daftar Bank ACCD yang telah ditunjuk BI dan PBoC:

Tabel 1. Bank yang ditetapkan sebagai Bank ACCD oleh BI dan PboC

Bank di Indonesia	Bank di China
PT. Bank Central Asia, Tbk	Agriculture Bank of China
Bank of China (Hongkong), Ltd	Bank of China
PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk	Bank of Ningbo
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Bank Mandiri Shanghai Branch
PT. Bank ICBC Indonesia, Tbk	China Construction Bank
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Industrial and Commercial Bank of China
PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	Maybank Shanghai Branch
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	United Overseas Bank (China) Limited
PT. Bank OCBC NISP, Tbk	
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	
PT. Bank UOB Indonesia	

Sumber: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/sp_2322721.aspx

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank didapati mekanisme pembayaran transaksi menggunakan LCS adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah LCS Cina membuka rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang dibuka oleh Bank ACCD Indonesia di negara Cina untuk mendukung pelaksanaan LCS.
- b) Nasabah LCS Indonesia membuka rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Yuan yang dibuka oleh Bank ACCD China di negara Indonesia untuk mendukung pelaksanaan LCS.
- c) Nasabah LCS di kedua negara melakukan transaksi pembayaran baik berupa perdagangan maupun investasi melalui rekening yang masing-masing telah dibuat.
- d) Bank yang ditunjuk sebagai ACCD melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi transaksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dan disepakati kedua bank sentral negara tersebut.

III. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun penelitian kepustakaan menurut Zed ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder dimana data tidak diambil oleh peneliti secara langsung melainkan diambil dari buku, jurnal, artikel internet, laman berita, dan bahan bacaan lain yang sudah dipilih sesuai dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari tahap *editing*, *organizing*, dan *finding*. Pada tahap awal yaitu *editing*, peneliti memeriksa data dan bahan bacaan yang diperoleh dengan mengedepankan kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya. Tahap *organizing* dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh sesuai kebutuhan penelitian, dan pada tahap terakhir atau *finding* dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan kaidah-kaidah teori dan metode yang telah ditentukan sehingga akan didapatkan kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis SWOT yang terdiri dari *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*. Menurut Siagian analisis SWOT merupakan salah satu dari berbagai instrumen analisis yang ampuh jika digunakan secara tepat dengan melihat beberapa faktor yang terdapat pada suatu masalah dan berusaha untuk memetakannya satu persatu (Kuswanti, 2016). Analisis *strengths* diambil untuk menganalisis kelebihan dari kebijakan LCS RI-China dan *weaknesses* digunakan untuk menganalisis kekurangan dan kelemahan dari kebijakan LCS RI-China, sedangkan *opportunity* menganalisis peluang atau kesempatan dari adanya kebijakan LCS RI-China dan *Threats* menganalisis hambatan serta tantangan yang dialami saat penerapan kebijakan LCS RI-China dilaksanakan.

IV. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan *Local Currency Settlement* atau pembayaran transaksi menggunakan mata uang lokal merupakan salah satu bagian dari kebijakan moneter pemerintah Indonesia yang dilakukan dibawah wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral milik Republik Indonesia yang bekerjasama dengan bank-bank sentral negara mitra. Kebijakan LCS dibuat untuk memudahkan pembayaran transaksi di bidang perdagangan maupun investasi yang dilakukan antar pelaku usaha lintas negara, sebelum adanya LCS sudah terdapat kebijakan-kebijakan pembayaran lainnya yang tergolong ke dalam jenis *Cross Border Payment* atau pembayaran

transaksi ke luar negeri, pembayaran transaksi ke luar negeri yang populer misalnya L/C atau *Letter of Credit*. Untuk itu kebijakan LCS bukanlah satu-satunya mekanisme pembayaran transaksi luar negeri, namun terdapat banyak perbedaan antara LCS dengan L/C apabila ditinjau dari segi efisiensi dan efektivitas, berikut merupakan analisis SWOT mengenai kebijakan LCS:

Kelebihan LCS (*Strengths*)

Kebijakan LCS jika ditinjau dari kekuatannya maka merujuk pada kelebihan mekanisme dari LCS tersebut. Dari segi mekanisme, pelaku usaha dari negara Indonesia dan negara mitra tidak harus membuat banyak dokumen khusus untuk bisa menggunakan mata uang lokal dalam bidang perdagangan seperti ekspor dan impor serta pembiayaan investasi karena mereka difasilitasi untuk membuat rekening nasabah LCS langsung. Sebagai contoh, Bank yang menjadi fasilitator pada LCS hanya satu jenis yaitu bank ACCD yang terdiri dari bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia dan negara mitra seperti China. Namun berbeda dengan bank yang dibentuk sebagai fasilitator pada sistem pembayaran luar negeri L/C yang terdiri dari Bank Penerbit (*Issuing Bank*), Bank Penerima (*Advising Bank*), dan Bank Tertunjuk (*Nominnated Bank*) sehingga akan lebih efisien jika menggunakan mekanisme LCS yang diatur hanya lewat bank ACCD.

Begitupula dengan pengajuan penggunaan layanan L/C bagi pelaku usaha harus memiliki Surat Kuasa Pembebanan L/C yang ditandatangani Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Menteri Keuangan untuk diteruskan ke pihak Bank Indonesia agar dapat menarik pinjaman dan Surat Persetujuan Pembukaan L/C. Berbeda dengan LCS yang lebih mudah dalam proses pengajuan dengan membuat rekening khusus nasabah LCS baik pelaku usaha di negara China maupun pelaku usaha di negara Indonesia. Dalam segi pembiayaan dan pembayaran layanan pada LCS juga tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dan menggunakan mata uang lokal sehingga biaya konversi mata uang terjadi satu kali dalam pengurusan dan pelayanan lebih murah bagi pelaku usaha. Kelebihan LCS lainnya adalah pelaku usaha dapat mengisi saldo rekening LCS sehingga tidak memerlukan kartu kredit khusus berbeda dengan sistem L/C yang menggunakan *Letter of Credit* atau bertransaksi secara kredit dan memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan (Angelia, 2021).

Kelebihan ketiga dari penerapan LCS adalah Indonesia memiliki sendiri standarisasi transaksi pembayaran digital atau Standar Nasional Open API (SNAP) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam penerapan SNAP mengembangkan *Developer Site SNAP* yang terdiri dari publikasi standar, aplikasi pengujian *Open API* pembayaran berbasis SNAP yang bersifat daring, dan direktori publikasi, dengan adanya SNAP, transaksi LCS antara Indonesia dan China semakin lebih mudah, cepat, dan efisien yang akan mendukung produktivitas masyarakat dan pembangunan sistem perbankan yang modern.

Kelemahan (*Weaknesses*)

Salah satu tujuan dari adanya kebijakan LCS adalah menyetabilkan dan menguatkan nilai mata uang Rupiah salah satunya dengan meng-internasionalisasikan Rupiah di negara lain, dengan perantara instrumen kebijakan, yang mana kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan suatu negara. Kebijakan LCS tunduk pada kondisi di setiap negara pengguna seperti Indonesia dan China yang memiliki isu politik dalam dan luar negeri yang dinamis serta berbeda, sehingga transaksi yang dilakukan dengan sistem LCS tidak dapat dipastikan selalu stabil dan erat kaitannya dengan fleksibilitas kebijakan bank sentral Indonesia dan Cina karena nilai tukar Rupiah dan Yuan akan ikut berubah. Contoh pengaruh

politik yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah dan Yuan misalnya ketika terjadi perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang saling menaikkan tarif barang impor pada tahun 2019 menyebabkan ketidakstabilan pasar uang dan pasar saham hingga dikeluarkannya keputusan Presiden Donald Trump untuk membuat kesepakatan dagang (Handoyo, 2019). Dampak dari lemahnya ekonomi China akan mempengaruhi permintaan barang ekspor Indonesia yang akan ikut turun sebab China termasuk pasar ekspor terbesar Indonesia.

Kasus selanjutnya ketika pandemi Covid-19 muncul dan ekonomi dunia lumpuh karena kegiatan investasi dan perdagangan harus terhalang oleh pembatasan sosial, ditambah konflik perang antara Ukraina dan Rusia. Dampak geopolitik dari konflik Rusia Ukraina tersebut terjadi saat Eropa dan Amerika Serikat menuntut Rusia untuk menghentikan perang, akibat Rusia menolak gencatan senjata, Amerika dan Eropa memberikan sanksi ekonomi besar-besaran kepada Rusia yang mana sanksi tersebut memperparah ekonomi dunia, mulai dari ekspor impor minyak dan gas alam, bahan pangan, dan komoditi ekspor Rusia lainnya, hal ini berdampak pula pada industri China dan Indonesia. Akibat konflik Rusia Ukraina pada kuartal 1 tahun 2022, nilai tukar rupiah harus mengalami depresiasi atau lemah sampai pada 0,33% menyebabkan investor mengalihkan dana mereka menuju aset aman (Pangastuti, 2022). Berbeda dengan China, saat Rusia disanksi banyak negara dengan pemblokiran akses menggunakan dolar Amerika Serikat, mata uang Yuan semakin menguat karena Rusia memperbanyak valas Yuan sebagai cadangan devisa. Oleh karena itu, LCS tetap memiliki kekurangan yaitu tidak bisa memberikan standar pasti untuk konversi mata uang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang lokal serta perubahan statistik harga sekuritas dalam periode tertentu (Volatilitas).

Kelemahan LCS selanjutnya adalah kerugian negara atau defisit neraca perdagangan tetap bisa terjadi yang menyebabkan hanya salah satu pihak akan lebih diuntungkan. Ekspor China ke Indonesia lebih mendominasi pada manufaktur, untuk itu pemerintah harus tetap menjaga daya saing ekspor produk lokal ke negara mitra meskipun biaya tarifnya lebih murah karena tidak ada biaya dua kali konversi mata uang seperti bertransaksi menggunakan dolar. Terlebih dengan meningkatkan daya tawar produk Indonesia seperti pada produk manufaktur agar mendapat nilai lebih tinggi pada perdagangan global, dengan adanya peningkatan nilai ekspor maka nilai tukar mata uang di suatu negara akan semakin tinggi dan mata uang semakin kuat (Silitonga et al, 2017).

Peluang (*Opportunities*)

Terdapat beberapa peluang dan kesempatan adanya penerapan kebijakan LCS antara Cina dan Indonesia antara lain: Memperkuat stabilitas perekonomian dengan diversifikasi mata uang; Pelaku UMKM lokal dan industri nasional memiliki kesempatan besar untuk membuka pasar ekspor di China; dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Diversifikasi merupakan upaya untuk mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai aset investasi dengan menggabungkan berbagai instrumen aset investasi. Pada diversifikasi mata uang lokal dilakukan strategi pengalihan investasi ke berbagai mata uang. Sebagai contoh, ketika kondisi perekonomian lemah akibat pandemi terjadi penurunan nilai mata uang Rupiah, maka langkah diversifikasinya dengan mengalihkan beberapa investasi menggunakan mata uang negara lain misalnya 60% IDR dan 40% USD sehingga penurunan nilai investasi dapat dikurangi, dengan transaksi menggunakan mata uang lokal, diversifikasi mata uang dapat terjadi dan ketergantungan terhadap dolar dapat diminimalisir, hal ini juga dikarenakan pelaku usaha dapat mengkonversi langsung dengan mata uang lokal negara mitra tanpa harus

menukar dengan dolar terlebih dahulu. Keuntungan ini dapat mempermudah perdagangan antara China dan Indonesia terlebih di saat dolar Amerika melemah.

Adanya kebijakan LCS antara Indonesia dan China, pengusaha lokal seperti UMKM dan produsen komoditi ekspor non migas mendapat kesempatan lebih besar untuk masuk di pasar China, hal ini dikarenakan tarif ekspor yang lebih murah, dapat menggunakan Rupiah tanpa harus membeli dolar Amerika untuk membayar transaksi, kemudahan dalam menggunakan layanan Bank ACCD, dan adanya jaminan keamanan dan kepercayaan pengguna layanan LCS, serta penyerapan tenaga kerja semakin tinggi seiring dengan peningkatan ekspor Indonesia ke China.

Volume perdagangan antara Indonesia dan China semakin meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2021 nilai ekspor Indonesia ke China mencapai 63,63 miliar USD dibanding dengan nilai impor pada tahun yang sama mencapai 60,71 miliar dolar Amerika Serikat. Pencapaian ini membuat Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan Indonesia dan China pada tahun tersebut (Zuraya, 2022). Selain itu pada tahun 2021, nilai transaksi LCS antara Indonesia dan China tahun mencapai 1,68 miliar dolar AS lebih tinggi dari pencapaian pada tahun sebelumnya sebesar 800 juta dolar AS (Elena, 2021). Adanya peningkatan volume perdagangan Indonesia dan China dengan sistem transaksi LCS, maka permintaan terhadap Rupiah meningkat dan menghasilkan stabilitas nilai Rupiah ikut mengalami peningkatan juga.

Tantangan (*Threats*)

Pada kebijakan LCS Indonesia-China tantangan yang dihadapi salah satunya terkait kestabilan nilai tukar Rupiah. Sehingga pengaruh yang dapat mengancam pergerakan nilai Rupiah akan berdampak pada pembiayaan pelaku usaha yang menggunakan LCS, mulai dari penurunan kegiatan ekspor impor akibat beban biaya dan tingginya konversi nilai kurs mata uang negara China hingga kemampuan daya tawar produk ekspor Indonesia ketika bersaing di negara China. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penerapan LCS adalah sebagai berikut: Dedolarisasi dolar Amerika Serikat bisa memicu sanksi ekonomi dari Amerika Serikat; Konflik yang diakibatkan situasi politik dan kemananan global; Krisis keuangan; Ancaman kemanan data; dan Ketergantungan ekonomi Indonesia pada China.

Dedolarisasi dolar Amerika Serikat dapat mengurangi beban mata uang untuk tetap memiliki nilai tukar stabil sehingga kegiatan perdagangan dan investasi tetap bisa berjalan, namun dapat memicu ketegangan antara Indonesia, China maupun negara lain yang menerapkan transaksi LCS dengan kekuatan sanksi ekonomi Amerika Serikat. Sebagai contoh kasus, Arab Saudi sendiri sudah melakukan transaksi minyak dengan China dan Rusia dengan kerangka LCS juga (*petroyuan*), namun di banyak negara masih dipengaruhi oleh sistem *petrodollar* dalam membayar transaksi minyak dan komoditi migas lainnya (Yovanda, 2022). Sehingga apabila Amerika Serikat memberikan sanksi seperti kenaikan suku bunga dan tarif barang impor ke negaranya maka akan berdampak pada produk ekspor Indonesia dan nilai kurs Rupiah.

Konflik dan ketegangan global seperti geopolitik dapat menimbulkan ancaman ekonomi yang berimbas pada pembatasan dan gangguan kegiatan ekspor impor sehingga pergerakan nilai tukar Rupiah terhambat, dengan adanya kondisi tersebut berdampak langsung bagi pengusaha dan investor yang berujung pada berkurangnya kemampuan pembiayaan produksi dan distribusi produk ekspor. Imbas lainnya muncul ketika risiko terkait keluarnya arus modal asing yang dapat melemahkan posisi cadangan devisa (*capital flow*). Sehingga berdampak pada pembiayaan LCS Indonesia – China oleh pelaku usaha Indonesia (Pink, 2022).

Krisis keuangan juga mempengaruhi kebijakan LCS misalnya inflasi. Inflasi yang berkepanjangan dapat mempengaruhi perekonomian nasional Indonesia. Peningkatan inflasi di suatu negara akan berimbas pada berkurangnya permintaan atas mata uang Rupiah dan kegiatan ekspor Indonesia juga ikut turun disebabkan harga produksi yang lebih tinggi (Jayantiti & Sudarmiani, 2017). Sebaliknya keadaan bisa diperparah dengan permintaan impor yang semakin tinggi dan mengakibatkan cadangan devisa negara ikut menipis, dengan adanya inflasi yang tinggi di Indonesia, maka nilai tukar valuta asing dalam hal ini adalah mata uang Yuan akan ikut terpengaruh.

Tantangan kebijakan LCS selanjutnya adalah ancaman keamanan data. Ancaman keamanan ini terkait kejahatan perbankan digital dimana pembobolan rekening nasabah LCS bisa terjadi kapanpun. Transformasi teknologi membantu mempercepat transaksi namun memiliki kerentanan terhadap keamanan. Beberapa kejahatan perbankan digital antara lain *card-skimming*, *carding*, dan *phising* (Anggraeni, 2022). *Card Skimming* ialah kejahatan yang terjadi saat pelaku kejahatan mencuri data nasabah lewat strip magnetis pada kartu kredit atau debit nasabah. *Carding* ialah kejahatan perbankan yang tidak jauh berbeda dengan *Card Skimming* namun pelaku kejahatan mendapatkan data kartu kredit dan debit secara ilegal melalui pihak ketiga seperti marketing palsu dan merchant palsu, sedangkan kejahatan perbankan yang lebih berbahaya dari *card-skimming* dan sering terjadi ialah *phising*, dimana data nasabah dicuri dengan memancing nasabah memberikan data mereka tanpa mereka sadari melalui saluran *internet banking*, sehingga uang nasabah akan hilang tanpa harus menggunakan kartu kredit dan debit terlebih dahulu.

Tantangan penerapan kebijakan LCS Indonesia-China kelima ialah Ketergantungan ekonomi Indonesia pada China. Kebijakan dan kondisi politik China dapat menyebar cepat ke Indonesia akibat semakin intensnya hubungan perdagangan di kedua negara. Kemajuan perdagangan China dipengaruhi oleh daya produksi produk ekspor mereka yang tinggi dengan bantuan teknologi mutakhir di bidang manufaktur, pertanian, dan komoditas ekspor lainnya. Selain itu Kebijakan moneter mereka berupa devaluasi mata uang Yuan juga menjadi ancaman bagi Indonesia. Devaluasi atau pelemahan mata uang lokal China menyebabkan tingginya harga impor dan murahness harga ekspor (Gosta, 2015). Murahness harga ekspor mengakibatkan daya serap produk ekspor mereka tinggi di pasaran global dan akan mempengaruhi produk-produk lokal Indonesia. Sisi lain adanya kebijakan devaluasi oleh China menyebabkan produk Indonesia sulit masuk ke pasar China karena harga tarif barang impor yang tinggi, sedangkan pendapatan nasional Indonesia lebih besar pada kegiatan ekspor untuk itu perlu peningkatan kemampuan produksi dalam negeri terkait produk-produk yang memiliki daya tawar tinggi di pasar global.

V. Kesimpulan dan Saran

Dedolarisasi dolar Amerika Serikat menjadi salah satu upaya dan strategi untuk menyetabilkan nilai mata uang Rupiah. Dedolarisasi juga sebagai strategi apabila dolar AS melemah dan dapat mempengaruhi mata uang lainnya. Salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan dolar AS adalah menggunakan sistem pembayaran dengan mata uang lokal atau *Local Currency Settlement*. Pada transaksi dengan sistem LCS Indonesia dan China kedua negara menggunakan mata uangnya masing-masing yakni Rupiah dan Yuan dalam pembiayaan perdagangan dan investasi. Penerapan LCS difasilitasi oleh bank khusus yang ditunjuk oleh sentral kedua negara yang disebut Bank ACCD. Pengusaha dan investor di kedua negara dapat membuka rekening nasabah LCS melalui bank tersebut dengan pedoman mekanisme peraturan yang sudah ditentukan oleh bank sentral kedua negara.

Penyelesaian transaksi menggunakan LCS memiliki kelebihan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Kelebihan dari penerapan LCS antara lain kemudahan dalam pengajuan nasabah LCS, efisiensi transaksi, dan standarisasi mata uang dengan menggunakan SNAP. Kelemahan LCS ialah sebagai kebijakan moneter maka dapat mudah dipengaruhi oleh kondisi politik di negara Indonesia dan China, kuota nilai tukar mata uang tidak bisa selalu sama dan akan berubah sesuai pasar keuangan dunia, dan salah satu negara dapat lebih diuntungkan atau dirugikan akibat persaingan perdagangan dan investasi yang mempengaruhi nilai tukar mata uang lokal.

Tidak hanya kelebihan dan kelemahan, peluang dari penerapan LCS berdampak pada diversifikasi mata uang yang dapat meminimalisir penurunan nilai investasi dan ketergantungan kepada satu mata uang tunggal seperti dolar AS, meningkatnya daya ekspor Indonesia ke China dengan kemudahan mengakses layanan LCS bagi pelaku usaha besar maupun UMKM Indonesia, membuka pasar ekspor Indonesia lebih besar di China dan penyerapan tenaga kerja, serta terjadinya stabilitas ekonomi. Tantangan yang dialami dalam penerapan LCS Indonesia dan China meliputi ancaman ketegangan dan keamanan global, ancaman sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, ancaman keamanan data seperti *Card Skimming*, *Carding*, dan *Phising*, krisis keuangan seperti inflasi, ketergantungan perekonomian terhadap China dan ancaman kebijakan devaluasi mata uang China yang dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia.

Adanya penerapan LCS memiliki banyak manfaat bagi Indonesia yaitu volume perdagangan Indonesia dan China semakin meningkat dengan kemudahan dalam pembayaran menggunakan mata uang lokal serta hubungan bilateral Indonesia di bidang perdagangan dan investasi semakin erat. Kedepannya penelitian terbaru diharapkan dapat membahas lebih jauh mengenai penerapan LCS di negara China dan negara-negara lain sebagai mitra dagang Indonesia sekaligus membahas pengaruh LCS terhadap peningkatan daya ekspor Indonesia dan China.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Anggraeni, R. (2022). Ini Jenis-Jenis Kejahatan Digital Perbankan dan Tips Menghindarinya! <https://finansial.bisnis.com/read/20220507/90/1530596/ini-jenis-jenis-kejahatan-digital-perbankan-dan-tips-menghindarinya>
- Bank Indonesia. (2020). Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank.
- BI. (2021). Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 23/ 16 /PADG/2021 tentang Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_231621.aspx
- Br Silitonga, R., Ishak, Z., Mukhlis, D., Jurusan, M., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Sriwijaya, U., & Pembangunan, J. E. (2017). Pengaruh ekspor, impor, dan inflasi terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 53–59. <https://doi.org/10.29259/JEP.V15I1.8821>
- Elena, M. (2021). Transaksi LCS RI dan China Capai US\$15 Juta per Bulan, Ini Komentar BI. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211223/9/1481184/transaksi-lcs-ri-dan-china-capai-us15-juta-per-bulan-ini-komentar-bi>

- FBN. (2022). Perang Rusia-Ukraina Bikin Yuan China Mendunia : Okezone Economy. <https://economy.okezone.com/read/2022/03/29/320/2569523/perang-rusia-ukraina-bikin-yuan-china-mendunia>
- Frassminggi, K. (2014). Dari bretton woods ke petro-dollar: analisis dan evaluasi kritis sistem moneter internasional. *Global Dan Strategis*, Vol. 8 No., 233–254. <http://journal.unair.ac.id/JGS@dari-bretton-woods-ke-petro-dollar--analisis-dan-evaluasi-kritis-sistem-moneter-internasional-article-7711-media-23-category-8.html>
- Gosta, D. R. (2015). Apa Arti Devaluasi Yuan? <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150826/9/465979/apa-arti-devaluasi-yuan>
- Handoyo. (2019). China menaikkan tarif barang-barang asal AS US\$ 60 miliar mulai 1 Juni. <https://internasional.kontan.co.id/news/cina-menaikkan-tarif-barang-barang-asal-as-us-60-miliar-mulai-1-juni>
- Kemendag RI. (n.d.). Laporan Triwulan (LAPTRI) Kementerian Perdagangan 2021 - Triwulan II - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Retrieved September 16, 2022, from <https://www.kemendag.go.id/id/about-us/strategic-planning/laporan-triwulan-laptri-kementerian-perdagangan-2021-triwulan-ii-1>
- Kemendag RI. (2021). Perdagangan Bilateral, RI-RRT Sepakat Gunakan Mata Uang Lokal - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/perdagangan-bilateral-ri-rrt-sepakat-gunakan-mata-uang-lokal-1>
- Kuswanti, H. (2016). Pengertian dan Penjelasan Analisis SWOT - dKampus. <https://www.dkampus.com/2016/02/pengertian-analisis-swot/>
- Malik, A. A. (2020). Politik Ekonomi Indonesia: Lanskap dan Dinamika Kontemporer. Intrans Publishing.
- Mas'ood, M. (2008). Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan. Pustaka Pelajar.
- Pangastuti, T. (2022). Dipicu Perang Rusia-Ukraina, Rupiah Melemah Sepanjang Kuartal I-2022. <https://investor.id/business/290524/dipicu-perang-rusiaukraina-rupiah-melemah-sepanjang-kuartal-i2022>
- Perkasa, G. A. (2019). Hubungan Indonesia Dan Tiongkok Pasca Diluncurkannya Kebijakan Luar Negeri Belt And Road Initiative (Bri) Tahun 2013-2018. <http://elibrary.unikom.ac.id>
- Pink, B. (2022). Konflik Rusia-Ukraina Diprediksi Berdampak Terbatas ke Kurs Rupiah. <https://nasional.kontan.co.id/news/konflik-rusia-ukraina-diprediksi-berdampak-terbatas-ke-kurs-rupiah>
- Rinaldi. (2020). Mengurangi Ketergantungan Dolar AS, Baik atau Buruk? <https://news.detik.com/kolom/d-4888370/mengurangi-ketergantungan-dolar-as-baik-atau-buruk>
- Sebayang, R. (2019). Ini Alasan Negara-Negara Besar Dunia Mulai “Buang Dollar.” CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20191101111757-21-111935/ini-alasan-negara-negara-besar-dunia-mulai-buang-dollar>
- Wijayanti, Y., & Sudarmiani. (2017). Pengaruh tingkat inflasi terhadap nilai tukar rupiah (Studi pada Bank Indonesia periode tahun 2011-2015). *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1), 32–44. <https://doi.org/10.25273/EQUILIBRIUM.V5I1.1004>
- Wuisan. Pretty Angelia. (2021). Letter of Credit adalah: Jenis, Mekanisme, dan Manfaatnya. <https://www.modalrakyat.id/blog/letter-of-credit-adalah>
- Yovanda, Y. R. (2022). Analisis Sebut Tren Dedolarisasi Jadi Tantangan Baru, Ini Dampaknya ke Stabilitas Rupiah. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/analisis-sebut-tren->

dedolarisasi-jadi-tantangan-baru-ini-dampaknya-ke-stabilitas-rupiah/ar-AA11ldkW?pfr=1&infiniteframe=4&infiniteReadingLastFrame=true

Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.

Zuraya, N. (2022). Indonesia Surplus Perdagangan dengan China pada 2021 | Republika Online. <https://www.republika.co.id/berita/r6oiwq383/indonesia-surplus-perdagangan-dengan-china-pada-2021>